

Jurnal Ilmiah

PEURADEUN

Media Kajian Ilmiah Sosial, Politik, Hukum, Agama dan Budaya



ETHNIC POWER SHARING: THREE BIG PROBLEMS

Donald L. Horowitz

**SOCIAL CAPITAL AND POLITENESS STRATEGIES IN FOSTERING ETHNIC
RELATION IN MALAYSIA AND PHILIPPINES**

Francisco Perlas Dumanig

**A JOURNEY TO THE QUALITATIVE WONDERLAND: LESSONS LEARNED
FOR NOTIVE RESEARCHERS**

Kuan Chen Tsai

**ISLAM DAN KEKERASAN: PENGALAMAN UNTUK ACEH
(Tinjauan Aspek Sosio-Historis dan Sosio-Antropologis)**

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad

**PERGURUAN TINGGI DAN TRANSFORMASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM
KONTEKS SOSIAL-BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA**

Samsi Pomalingo

PENELUSURAN AKAR HADITS

Damanhuri

PENDIDIKAN DALAM KELUARGA

Basidin Mizal

JIP

International Multidisciplinary Journal
OAJI: 745/1396982282-2014/R-6.465
ORCHID iDs: 0000-0001-8492-315X

Thomson Reuters: RID-F-6135-2014
ISI Impact Factor Value 2013 ICR: 0.217
Google Scholar Index-h:3, i10: 3

 Copernicus Publications
The Innovative Open Access Publisher



SCAD Independent
IAO Accreditation
4-8362/387/IAO/2014



**RE-DESIGN KURIKULUM EKONOMI SYARIAH PERGURUAN
TINGGI AGAMA ISLAM:
(Sebuah Upaya Melahirkan Sumber Daya Manusia Profesional)**

Nilam Sari¹

Abstract

The development of Islamic banking quantitatively, not supported by the availability of adequate human resources. Problems that occur at this time is the lack of reliable human resources in the field of Islamic economics, is a constraint that makes slowing economic development of Islam in Indonesia. Human intellectual capital plays an important role in driving the performance and competitiveness. Innovation in the financial industry in general and Islamic finance in particular requires the availability of expertise (expertise) and expertise (skills). Not only are the operational aspects, professionals also needed to support research and development in order to strengthen the capacity to innovate. Islamic University has a very important role in determining the future of Islamic Economics. If you see the future of Islamic economics, human resources required are those who not only understand the Islamic economic philosophy but also positive-normative-empirical. Two mastery must still be supported by the development of good character. The campus is not just a process of transfer of knowledge but also the transfer of character. Of course, this requires cooperation to establish all elements of the organizers of the college. Among the steps that can be done by universities in Indonesia in the development of Islamic economics, universities can standardize the curriculum of Islamic economics throughout Indonesia and curriculum development.

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Tenaga Pengajar pada Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, menyelesaikan Doktorat dalam Ilmu Ekonomi Syariah. E-mail: habibti1971@yahoo.com.

مستخلص

تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية من الناحية الكمية، غير معتمدة من قبل وافر الموارد البشرية الكافية. المشكلات التي تحدث في هذا الوقت هو عدم وجود الموارد البشرية وثيقة في مجال الاقتصاد الإسلامي، هو القيد الذي يجعل تباطؤ التنمية الاقتصادية في الإسلام في إندونيسيا. رأس المال الفكري البشري يلعب دورا هاما في دفع الأداء والقدرة التنافسية. الابتكار في القطاع المالي في المالية العامة والإسلامي على وجه الخصوص يتطلب توافر الخبرة والخبرة (مهارات). ليس فقط الجوانب التشغيلية، وهناك حاجة أيضا المهنيين لدعم البحث والتطوير من أجل تعزيز القدرة على الابتكار. لديه الجامعة الإسلامية دورا هاما جدا في تحديد مستقبل الاقتصاد الإسلامي. إذا كنت ترى مستقبل الاقتصاد الإسلامي، والموارد البشرية اللازمة لأولئك الذين يفهمون ليس فقط الفلسفة الاقتصادية الإسلامية ولكن أيضا إيجابية المعيارية تجربي. لا يزال يتعين دعم اثنين التمكن من تطوير شخصية جيدة. الحرم الجامعي ليست مجرد عملية نقل المعرفة ولكن أيضا نقل الحرف. بالطبع، وهذا يتطلب التعاون لإنشاء كافة العناصر من منظمي الكلية. ومن بين الخطوات التي يمكن أن تقوم به الجامعات في إندونيسيا في تطوير الاقتصاد الإسلامي، يمكن للجامعات توحيد مناهج الاقتصاد الإسلامي في جميع أنحاء إندونيسيا لتطوير المناهج الدراسية

Keywords: *Re-Design, Curriculum, Islamic Economic, Human Resources.*

A. Pendahuluan

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang begitu pesat, penyiapan SDM yang siap untuk masuk dalam industri ekonomi syariah di masa depan menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini dibuktikan bahwa permintaan lulusan ekonomi syariah, berdasarkan data dari *Institute for Management and Islamic Economic Development (IMIE)*, pada tahun 2012 pasar kerja Indonesia membutuhkan sekitar 50.000 tenaga kerja terlatih di bidang ekonomi, perbankan dan keuangan syariah. Padahal SDM ekonomi Syariah yang tersedia saat ini hanya baru sekitar 20.000 orang. Kebutuhan akan tenaga kerja terlatih di bidang ekonomi Syariah khususnya keuangan syariah terus meningkat (IMIE, 2012).

Mantan Deputy Gubernur BI, Siti Fajriyah mengatakan bahwa perkembangan perbankan syariah secara kuantitatif, ternyata tidak didukung dengan ketersediaan SDM yang mencukupi. Kebutuhan SDM untuk bank syariah mencapai 40.000 orang per tahun, sementara lulusan ekonomi syariah sangat terbatas, minimnya stok lulusan perguruan tinggi yang paham dengan ekonomi syariah membuat sebagian bank khususnya yang membuka *office channeling* memilih mentransfer pegawai dari bank konvensional. (UI, 2008)

Problematika yang terjadi pada saat ini adalah kekurangan sumber daya insani yang handal dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia (UI) diungkapkan bahwa lebih dari 90% SDM Bank Syariah saat ini tidak berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah. Hal yang senada juga disampaikan oleh Wahyu Dwi Agung (Mantan Ketua Asbisindo) dan M. Syakir Sula, saat ini hanya 10% saja SDM yang memiliki latar belakang ekonomi syariah yang bekerja di industri keuangan syariah dan 90% lagi berlatar belakang dari industri lembaga keuangan konvensional yang di "*karbitkan*" untuk bekerja di lembaga keuangan syariah (Amalia dkk, 2012: 40)

Kendati tren perkembangan Bank Syariah di Indonesia terus meningkat, namun persoalan sumber daya manusia tidak dapat dipungkiri menjadi kendala agak melambatnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, *human intellectual capital* memainkan peran penting dalam mendorong kinerja dan daya saing. Inovasi di industri keuangan secara umum dan keuangan syariah khususnya membutuhkan tersedianya kepakaran (*expertise*) dan keahlian (*skill*). Bukan hanya aspek operasional, tenaga profesional juga diperlukan untuk mendukung penelitian dan pengembangan guna memperkuat kapasitas dalam berinovasi.²

² Untuk mengetahui lebih jauh ulasan kritis lebih rinci tentang kondisi Indonesia, dibanding dengan Malaysia, lihat tulisan Hans-Dieter Evers. Transition towards a Knowledge Society: Malaysia and Indonesia Compared, downloaded from [www.uni-biedefeld.de/\(de\)/soz/iw/pdf/Evers_Transition.pdf](http://www.uni-biedefeld.de/(de)/soz/iw/pdf/Evers_Transition.pdf). pada 14 September 2012.

Menurut Syafii Antonio, profesional yang dibutuhkan dalam industri keuangan syariah agak unik dibandingkan dengan industri konvensional. Para profesional di industri keuangan syariah dituntut memiliki kompetensi keilmuan dan *skill* yang “mensenyawakan” ilmu syariah dan keuangan. Prinsip syariah harus “larut” dalam aspek operasional LKS, termasuk dalam mendesain produk-produk perbankan dan struktur keuangan syariah, akad keuangan dan pelaksanaannya, manajemen likuiditas dan neraca, dan manajemen risiko (Antonio, 2007: 11-14).

Pihak perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan *out put* yang profesional dan berkualitas. Lulusan perguruan tinggi harus memiliki kualitas yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri keuangan Islam saat ini. Dari sekian banyak jumlah perguruan tinggi Islam di Indonesia saat ini, yang membuka jurusan ekonomi atau perbankan syariah jumlahnya masih sangat sedikit. Secara kuantitas, lembaga pendidikan ekonomi syariah saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini dilihat dari jumlah lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan ekonomi syariah saat ini masih sekitar 12.5% dari total pegawai yang bekerja di perbankan syariah saat ini. Sementara kebutuhan terhadap sumber daya insani (SDI) dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Selama ini keterbatasan sumber daya insani yang kompeten dalam bidang syariah banyak ditutupi dengan cara menempatkan karyawan yang tidak sesuai dengan kualifikasi.

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan masa depan Ekonomi Islam. Dari kampuslah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membangun ekonomi Islam berasal. Jika melihat masa depan ekonomi Islam, SDM yang dibutuhkan adalah mereka yang tidak hanya paham ekonomi Islam secara filosofis-normatif tapi juga positif-empiris. Dua penguasaan ini tetap harus didukung oleh pembangunan karakter yang baik. Kampus tidak hanya sekedar proses *transfer of knowledge* tapi juga *transfer of character*. Tentunya untuk membangun ini membutuhkan kerja sama semua elemen penyelenggara perguruan tinggi.

Maraknya lembaga ekonomi syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan lembaga pendidikan yang memadai. Akibatnya, lembaga ekonomi syariah di Indonesia berupaya Islamisasi nama kelebagaannya. Pada dasarnya Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sangat berperan dalam pengembangan ekonomi syariah. Karena PTAI merupakan tombak dari kemajuan segala ilmu pendidikan, termasuk ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Euis Amalia, dkk. (2012: 167), ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi (PT) di Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah, yaitu : (1) Mendorong perguruan tinggi untuk segera membuka program studi ekonomi syariah secara tersendiri, di mana ilmu ekonomi syariah dikembangkan dengan memadukan pendekatan normatif keagamaan dan pendekatan kuantitatif empiris yang disertai oleh komprehensif dan analisis. Bahkan jika memungkinkan untuk dapat mendirikan Fakultas Ekonomi Islam (FEI) secara mandiri; (2) Memfasilitasi tenaga pengajar dalam bidang ekonomi syariah ke jenjang yang lebih tinggi, semakin meningkatkan mutu dan kualitas tenaga pengajar di Perguruan Tinggi, maka akan semakin meningkat pula kualitas lulusan ekonomi syariah, maka tingkat perkembangan ekonomi syariah akan semakin meningkat; (3) Perlu kiranya setiap PTAI untuk dapat melakukan standarisasi kurikulum tentang ekonomi syariah seluruh Indonesia. Artinya setiap PTAI yang membuka prodi ekonomi syariah perlu kiranya harus memenuhi standar terhadap kurikulum tentang ekonomi syariah; (4) Perlu diperkuat sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang mengajarkan ekonomi syariah, sehingga lulusan ekonomi syariah dapat berkualitas dan berintegritas yang tinggi.

Hal senada juga diungkap oleh Nur A. Fadhil (2012), dalam rangka pengembangan studi ekonomi syariah di PTAIN diperlukan penyesuaian kurikulum, peningkatan kapasitas dosen, keseimbangan rasio dosen dan peserta didik hingga penyusunan visi, misi dan silabus mata kuliah yang menyahuti tuntutan zaman sehingga dapat menghasilkan *output* dengan kualifikasi yang kompetitif. Perumusan ini harus dipikirkan dengan seksama serta membuka *network* dengan lembaga dan PTAI lainnya di

Indonesia, sehingga peserta didik yang dihasilkan benar-benar berdaya saing untuk mengisi dan menyemarakkan ekonomi Islam yang kian berkembang pesat di Indonesia, baik secara keilmuan maupun praktik.

Kehadiran konsentrasi ilmu ekonomi Islam dalam Fakultas dituntut ketersepaduan dan ketersinambungan agar *output* yang dihasilkan mampu memiliki kualifikasi tentang ilmu ekonomi Islam dan unggul dalam pemahaman tentang ilmu-ilmu syariah. Lebih jauh, kombinasi yang harus dimiliki oleh peserta didik akan rumpun ilmu syariah dan rumpun ilmu ekonomi Islam sehingga dapat memahami dan menguasai keduanya. Dari sini, maka tuntutan keterampilan profesional dari *output* yang diharapkan adalah mampu menggunakan ilmu ekonomi Islam dan ilmu hukum Islam (*fiqh*) dalam perilaku dan praktik (A. Wahid, 2013).

B. Kualifikasi Kebutuhan SDM Profesional Pada Perbankan Syariah

SDM yang dibutuhkan perbankan syariah yaitu SDM yang memiliki keterpaduan antara *knowled, skill, dan ability* (KSA) dengan komitmen moral dan integritas pribadi. Penekan pada aspek moralitas sangat penting karena diyakini sebagai salah satu faktor penentu dalam keberhasilan dalam industri perbankan syariah (Nurdin, 2014).

Prediksi pangsa pasar perbankan syariah (*market share*) yang pernah diharapkan mencapai angka lima persen pada tahun 2008 ternyata tidak tercapai, semua ini karena kurangnya SDM baik pada aspek kualitas maupun kuantitas yang sangat menentukan kinerja produktivitas dan keberhasilan suatu institusi (Nurdin, 2014). Menurut Agustianto (2011), kualifikasi dan standar SDM Ekonomi syariah adalah:

1. Memahami nilai-nilai moral dalam aplikasi fikih muamalah/ekonomi syariah.
2. Memahami konsep dan tujuan ekonomi syariah.
3. Memahami konsep dan aplikasi transaksi-transaksi (akad) dalam muamalah ekonomi syariah.
4. Mengenal dan memahami mekanisme kerja lembaga ekonomi/keuangan/perbankan/bisnis syariah.
5. Mengetahui dan memahami mekanisme kerja dan interaksi lembaga-lembaga terkait; regulator, pengawas, lembaga hukum, konsultan dalam industri ekonomi/keuangan/perbankan/bisnis syariah.

6. Mengetahui dan memahami hukum dasar baik hukum syariah (fiqh muamalah) maupun hukum positif yang berlaku.
7. Menguasai bahasa sumber ilmu yaitu Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang unik sebab di dalamnya melibatkan orang-orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi ahli bidang ekonomi, keuangan, perbankan dan kualifikasi dan kompetensi syariah. Dua sisi kualifikasi dan kompetensi ini dipadukan secara integral, oleh karena itu SDM Lembaga Keuangan Syariah harus mengembangkan hal tersebut.

C. Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum

Kurikulum merupakan jantung dunia pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Dunia yang semakin cepat mengglobal sekaligus menyempit (*global village*) tak pelak menyeret kurikulum pendidikan harus bersifat dinamis agar tidak ketinggalan perubahan zaman. Dinamis mengikuti dinamika perubahan lingkungan yang ada serta dinamis mengantisipasi segala kemungkinan perubahan masa depan. Berdasarkan alasan tersebut, kurikulum apa pun perlu senantiasa adaptif dan dikelola dengan baik, dalam semua jenjang dan jenis pendidikan.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Pasal 1, UU Tahun 2003). Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi (Pasal 1, Kepmendiknas Tahun 2000). Sedangkan menurut Grayson (1978), kurikulum merupakan suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran (*out-comes*) yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Perencanaan tersebut disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi, sehingga memberikan pedoman dan instruksi untuk mengembangkan strategi pembelajaran (materi di dalam kurikulum harus

diorganisasikan dengan baik agar sasaran (*goals*) dan tujuan (*objectives*) pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Akan halnya Harsono (2005), kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Dalam bahasa latin, kurikulum berarti *track* atau jalur pacu. Saat ini definisi kurikulum semakin berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan.

Berangkat dari beragam pengertian kurikulum di atas, bahwa setidaknya terdapat tiga konsep tentang kurikulum; yaitu kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi (Sukmadinata, 2005).

Konsep pertama; kurikulum sebagai suatu substansi. Suatu kurikulum, dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi peserta didik di suatu lembaga pendidikan, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. Suatu kurikulum juga dapat mencakup lingkup tertentu, suatu sekolah, suatu kabupaten, propinsi, ataupun seluruh negara.

Konsep kedua; adalah kurikulum sebagai suatu sistem. Yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia, dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis.

Konsep ketiga; kurikulum sebagai suatu bidang studi. Yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang

kurikulum. Melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan, mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Sehubungan dengan itu, dalam perbaikan kurikulum diperlukan pengembangan struktur kurikulum yang mesti dilakukan secara sistematis melalui tahapan-tahapan berikut:

1. **Menyusun Daftar Standar Kompetensi Lulusan.** Langkah pertama dari tahapan ini adalah menentukan standar kompetensi mana yang akan digunakan sebagai bahan baku penyusunan kurikulum. Standar kompetensi tidak diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan tetapi berdasarkan jenis atau rumpun kompetensi yang ada, dengan melihat beberapa acuan di antaranya level kompetensi, beberapa prasyarat yang terdapat dalam unit-unit kompetensi dan level dalam kompetensi kunci.
2. **Menyusun Substansi Kajian.** Substansi kajian (ranah pembelajaran) adalah pengalaman belajar atau materi yang akan dipelajari peserta didik dalam rangka penguasaan kompetensi yang dikembangkan untuk profesi yang bersangkutan.
3. **Mengidentifikasi dan Mengelompokkan Mata Kuliah.** Selanjutnya dilakukan identifikasi dan pengelompokan mata kuliah dengan cara sebagai berikut: a) Menyusun mata kuliah yang diperoleh dari hasil penjabaran kompetensi yang telah disusun; a) Mengelompokkan mata kuliah tersebut ke dalam kelompok Mata Kuliah Pendukung Kompetensi Utama (MKKU) dan Mata Kuliah Pendukung Kompetensi Pendukung (MKKP); c) Pendukung Kompetensi lainnya (MKKL), komposisi SKS untuk ketiga rumpun mata kuliah, mengikuti komposisi yang ada pada Kepmendiknas 045/U/2002 yakni MKKU: 40-80%, MKKP: 20-40%, dan MKKL: 0-30%; d) Khusus untuk mata kuliah wajib seperti Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris; mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan serta mata kuliah statistik dan atau matematika tidak dilakukan penurunan seperti mata kuliah di atas mengikuti ketentuan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. **Menentukan Beban Studi (SKS) Mata Kuliah.** Setelah merumuskan substansi kajian dan tingkat kedalamannya untuk setiap kompetensi dan menentukan serta mengelompokkan mata kuliah, selanjutnya dilakukan penghitungan bobot SKS setiap mata kuliah.
5. **Menyusun Struktur Program.** Dalam menyusun struktur program perlu diperhatikan: a) Pengelompokan standar kompetensi lulusan berdasarkan tahapan pencapaian setiap tahun; b) Jejaring mata kuliah; c) Prasyarat dari mata kuliah; d) Beban kredit maksimal persemester.
6. **Pengujian Model.** Pengujian yang dilakukan terhadap hasil penelitian dilakukan melalui uji validasi dalam bentuk *Focus Group Discussion (FGD)*. Teknik yang digunakan dengan mengadopsi teknik Delphi. Validasi dilakukan dengan memberikan struktur program yang dihasilkan pada saat pengembangan untuk dianalisa dan dimintakan *feed back* dari para *expert* di bidang Ahli kurikulum. Pengembangan kurikulum diulangi beberapa putaran sampai didapat hasil akhir yang jelas mengenai ide yang dikembangkan. Tahapan ini dilakukan untuk mencari makna sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan struktur kurikulum yang dikembangkan.
7. **Revisi.** Perbaikan dan penyempurnaan mengacu pada temuan-temuan yang didapatkan pada saat uji coba. Perbaikan yang paling banyak dilakukan adalah dengan menurunkan kompetensi ke dalam ranah pembelajaran. Banyak didapatkan temuan berupa kedalaman materi yang tidak tepat, ada beberapa yang terlalu rendah atau terlalu dalam. Kebanyakan dalam ranah kognitif. Perubahan yang terjadi memberikan imbas pada bobot beberapa mata kuliah yang diusung, ada yang berubah signifikan namun ada juga yang tidak mengalami perubahan. Perubahan bobot yang terjadi lebih memberikan makna pada saat implementasi karena dosen menjadi lebih tepat mengajarkan suatu pokok bahasan setelah mengetahui dengan pasti tujuan perkuliahan, kompetensi yang diusung serta kedalaman materi yang harus disampaikan.

D. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Menurut Nana Saodih Sukmadinata (2005), dalam proses pengembangan kurikulum, secara garis besar terdapat dua prinsip pengembangan kurikulum, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus.

1. Prinsip Umum

a. Prinsip Relevansi

Kurikulum harus memiliki relevansi keluar dan di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi ke luar maksudnya tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kurikulum menyiapkan peserta didik untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat. Kurikulum juga harus memiliki relevansi di dalam yaitu ada kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Relevansi internal ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum.

b. Prinsip Fleksibilitas

Kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur atau fleksibel. Kurikulum mempersiapkan peserta didik untuk hidup dalam kehidupan pada masa kini dan masa yang akan datang, di berbagai tempat dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Suatu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, maupun kemampuan, dan latar belakang peserta didik.

c. Prinsip Kontinuitas

Perkembangan dan proses belajar peserta didik berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan lainnya, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan yang akan digeluti.

d. Prinsip Kepraktisan/Efisiensi

Kurikulum mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya murah. Kurikulum yang terlalu menuntut keahlian-

keahlian dan peralatan yang sangat khusus serta biaya yang mahal merupakan kurikulum yang tidak praktis dan sukar dilaksanakan.

e. Prinsip Efektivitas

Walaupun prinsip kurikulum itu mudah, sederhana, dan murah, keberhasilannya harus diperhatikan secara kuantitas dan kualitas karena pengembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan.

2. Prinsip Khusus

Adapun yang menjadi prinsip khusus pengembangan kurikulum adalah:

a. Berkenaan dengan tujuan pendidikan

Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (khusus).

b. Berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan

Dalam memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, perlu penjabaran tujuan pendidikan/pembelajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana; *Kedua*, Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan; dan *Ketiga*, unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis.

c. Berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar

Adapun prinsip khusus berkaitan dengan pemilihan proses belajar mengajar hendaknya memperhatikan hal-hal, di antaranya: teknik belajar mengajar yang digunakan cocok dan variatif dalam mengadaptasi keragaman peserta didik; metode dan teknik yang digunakan dalam pembelajaran dapat memenuhi dan mencapai tujuan kognitif, afektif dan psikomotorik; serta berupaya untuk menguasai keterampilan yang

dibutuhkan kegiatan belajar mengajar yang lebih menekankan “*learning by doing*” selain “*learning by seeing and knowing*”.

d. Berkenaan dengan pemilihan media dan alat pembelajaran

e. Berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian

Penilaian merupakan bagian integral pengajaran, perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

- 1) Penyusunan alat penilaian (*test*)
- 2) Perencanaan suatu penilaian
- 3) Pengolahan hasil penilaian.

Seller dan Miller (1985) mengemukakan bahwa proses pengembangan kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Seller memandang bahwa pengembangan kurikulum harus dimulai dari menentukan orientasi kurikulum, yakni kebijakan umum, misalnya arah dan tujuan pendidikan, pandangan tentang hakikat belajar dan hakikat anak didik, pandangan tentang keberhasilan implementasi kurikulum, dan lain sebagainya. Berdasarkan orientasi itu selanjutnya dikembangkan kurikulum menjadi pedoman pembelajaran, diimplementasikan dalam proses pembelajaran dan dievaluasi. Hasil evaluasi itulah kemudian dijadikan bahan dalam menentukan orientasi, begitu seterusnya hingga membentuk siklus.

E. Re-Design Kurikulum Ekonomi Syariah pada Program Studi di Perguruan Tinggi

Dengan mengacu kepada landasan normatif ideal penerapan dan pengembangan kurikulum sebagaimana telah dibahas sebelumnya, re-design kurikulum ekonomi syariah pada prodi di perguruan tinggi dalam merealisasikannya diperlukan beberapa hal berikut:

1. Reorientasi visi dan misi Prodi.
2. Restrukturisasi pengembangan mata kuliah yang diajarkan.
3. Reformulasi target *output* yang diharapkan sesuai kualifikasi dan kebutuhan pasar.

Adapun penjelasan dari ketiga *item* tersebut adalah sebagai berikut:

1) Reorientasi visi dan misi Prodi

Dalam reorientasi visi dan misi prodi, disarankan agar visi dan misi itu disusun dan diarahkan secara realistis sehingga nantinya dapat diturunkan dan di *break down* dalam senarai mata kuliah yang diajarkan pada prodi tersebut secara bertahap. Penyusunan visi dan misi prodi tidak selamanya dibahasakan dalam bahasa yang ideal namun sulit pada realisasinya, namun sejatinya diarahkan pula secara realistis pada kebutuhan pasar perbankan syariah di Indonesia.

Dalam reorientasi visi dan misi prodi juga sejatinya harus sejalan dan selaras dengan visi misi dari Fakultas yang telah menyusun visi misi tersendiri secara bertahap per lima tahun untuk kemudian mengukur kesuksesan implementasi sekaligus evaluasi atas pelaksanaan dan capaian yang didapat.

2) Restrukturisasi pengembangan mata kuliah yang diajarkan

Restrukturisasi adalah peninjauan dan penyusunan ulang mata kuliah yang diajarkan di Prodi, sehingga lebih mengarah kepada pemerkuatan (*empowering*) *output* serta lebih siap dalam menghasilkan lulusan yang beretika dan kompetitif sebagaimana diharapkan dari visi dan misi prodi.

Desain program studi disarankan didesain untuk melahirkan praktisi dan operator yang berdaya guna dan siap ditempatkan langsung di dunia kerja. Dengan gelar akademik yang disandanginya, masa kuliah singkat pada prodi pada galibnya hanya menyaratkan mata kuliah yang berkaitan langsung dengan dunia praktik yang dibutuhkan saat para lulusannya terjun ke dunia kerja. Sejatinya pengembangan prodi lebih diarahkan pada penguatan kapasitas ilmu-ilmu terapan/praktis, terutama yang berkenaan dengan administrasi, komputerisasi, akuntansi serta segala hal yang berkenaan dengan aspek praktik yang dibutuhkan tentang perbankan syariah. Karenanya arah pengajaran mata kuliah yang bersifat normatif mestilah ditinjau ulang dan disusun kembali agar terarah pada pemerkuatan (*empowering*) *output* serta lebih siap dalam menghasilkan lulusan yang beretika dan kompetitif sebagaimana diharapkan dari visi dan misi prodi.

Selain itu, penamaan mata kuliah dengan bahasa dan istilah kontemporer juga akan sangat membantu prodi pada Fakultas berkenaan dalam menjelaskan serta menjual nama prodinya sehingga lebih *marketable* dengan mengombinasikan ilmu-ilmu syariah dengan kebutuhan praktis pasar zaman sekarang ini, sehingga sungguhpun berkembang nama mata kuliahnya, tetap tidak melupakan ilmu-ilmu syariat sebagai basis dan *core* dari prodi. Sebagai contoh yang dapat disebutkan di sini, penamaan mata kuliah Fiqh Transaksi Keuangan Modern, dan lain sebagainya

Dalam penyusunan dan restrukturisasi mata kuliah yang diajarkan di Prodi mesti disenyawakan unsur yang menjadi serapan mata kuliah institut dan mata kuliah yang menjadi *domain* bagi prodi untuk mengajarkan dan mengembangkannya.

- 3) Reformulasi target *output* yang diharapkan sesuai kualifikasi dan kebutuhan pasar

Reformulasi target *output*, idealnya, program studi ekonomi syariah harus menguasai; *Pertama*, menguasai aspek teknis profesi. Sebut saja misalnya, di bidang akuntansi perbankan, alumni harus menguasai aspek teknis bidang ini secara utuh dan teruji. *Kedua*, memahami aspek filosofis ekonomi Islam. Diharapkan lulusan ekonomi syariah sejatinya tidak hanya mengerti “kulit luar” ekonomi Islam, tetapi juga memahami nilai-nilai filosofi yang mendasari setiap ajaran juga harus dipahami dengan baik. Dengan cara ini sebutan bankir syariah “muallaq” tidak lagi terdengar. *Ketiga*, menguasai aspek fikih ekonomi Islam. dengan kata lain inilah yang disebut aspek normatif ekonomi Islam. Indikasinya, alumni ekonomi syariah mengetahui dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur’an ataupun Al-Hadis dan dapat menjelaskannya dengan baik. *Keempat*, mengetahui ilmu ekonomi konvensional setidaknya yang bersifat umum dan menjadi bidang keahliannya. *Kelima*, alumni ekonomi syariah juga harus memiliki integritas yang tinggi serta moral yang teruji.

Salah satu kendala yang menyebabkan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia terkesan lambat, kendati trennya terus meningkat adalah

persoalan sumber daya manusianya. Tidak dapat dipungkiri, *human intellectual capital* memainkan peran penting dalam mendorong kinerja dan daya saing. Inovasi di industri keuangan secara umum dan keuangan syariah khususnya membutuhkan tersedianya kepakaran (*expertise*) dan keahlian (*skill*). Bukan hanya aspek operasional, tenaga profesional juga diperlukan untuk mendukung penelitian dan pengembangan guna memperkuat kapasitas dalam berinovasi.³

Menurut Syafi'i Antonio (2007), profesional yang dibutuhkan dalam industri keuangan syariah agak unik dibandingkan dengan industri konvensional. Para profesional di industri keuangan syariah dituntut memiliki kompetensi keilmuan dan skill yang "men-senyawa-kan" ilmu syariah dan keuangan. Prinsip syariah harus "larut" dalam aspek operasional LKS, termasuk dalam mendesain produk-produk perbankan dan struktur keuangan syariah, akad keuangan dan pelaksanaannya, manajemen likuiditas dan neraca, dan manajemen risiko.

Dari sini, sebagai hasil dan *impact* dari pengajaran di Prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan Islam adalah menghasilkan lulusan berupa praktisi dan operator yang berdaya guna dan siap ditempatkan langsung di dunia kerja, khususnya perbankan syariah. Ini sekaligus menjawab tantangan realita perbankan syariah saat ini, sebagaimana disebutkan di bagian awal hasil penelitian ini, bahwa di antara kendala percepatan *market share* perbankan syariah ialah faktor SDM perbankan syariah yang secara kuantitatif masih kurang, lebih-lebih dari segi kualitasnya yang juga masih rendah. Bahkan menurut Wahyu Dwi Agung (mantan ketua ASBISINDO) dan Syakir Sula, saat ini baru 10% saja SDM yang memiliki latar belakang syariah yang bekerja di industri keuangan syariah dan yang 90% adalah berlatar belakang dari industri keuangan konvensional yang "dikarbit" melalui pelatihan singkat perbankan syariah.

³ Untuk mengetahui lebih jauh ulasan kritis lebih rinci tentang kondisi Indonesia, disbanding dengan Malaysia, lihat tulisan Hans-Dieter Evers. *Transition towards a Knowledge Society: Malaysia and Indonesia Compared*, downloaded from [www.uni-bielefeld.de/\(de\)/soz/iw/pdf/Evers_Transition.pdf](http://www.uni-bielefeld.de/(de)/soz/iw/pdf/Evers_Transition.pdf). pada 14 September 2012.

F. Penutup

Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam kancah persaingan global ke depan sangat ditentukan oleh siapa yang mengelolanya. Hal ini berarti peran SDM memiliki posisi sentral dalam perkembangannya. Permasalahan lembaga keuangan syariah ke depan masih terus perlu pengupayaan yang maksimal agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Di sisi lain lembaga keuangan syariah harus memberikan sesuatu yang lain yang tidak diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.

Upaya mempersiapkan kualifikasi SDM lembaga keuangan syariah di masa depan, terutama diarahkan kepada upaya peningkatan profesionalisme yang tidak hanya berkaitan dengan masalah keahlian dan keterampilan saja namun yang jauh lebih penting adalah menyangkut komitmen moral dan etika bisnis mendalam atas profesi yang dijalankannya. Pemahaman dan Perwujudan tindak nyata dari nilai-nilai agamis merupakan persyaratan mutlak bagi pelaku lembaga keuangan syariah masa depan.

Lembaga pendidikan, terutama Perguruan Tinggi Agama Islam prodi ekonomi dan keuangan syariah, merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab dan paling menentukan dalam menghasilkan SDM keuangan syariah yang kompeten dan bermutu. Dengan demikian, dapat dikatakan berhasil tidaknya pengembangan lembaga keuangan syariah di masa yang akan datang tergantung kepada lembaga pendidikan ekonomi syariah itu sendiri.

Dalam pengembangan lembaga pendidikan ekonomi keuangan syariah, ada beberapa faktor yang sangat signifikan, yaitu kurikulum, dosen yang berkualitas, sarana prasarana, literatur dan laboratorium praktik. Dalam pengembangan kurikulum, setidaknya harus memiliki kurikulum berbasis kompetensi, yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan materi kuliah ekonomi keuangan secara komprehensif, Silabus fikih muamalah, ushul fiqh, dan qawa'id fikih saat ini harus segera diubah dan *diupdate* disesuaikan dengan perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah kontemporer. Para dosen yang mengajar di S1 dan S2, sebagian besar masih mengajarkan fikih secara teori yang tidak bisa memecahkan problematika perbankan dan keuangan saat ini. Selain integrasi syariah dan keuangan

kontemporer, kurikulum juga idealnya dibekali dengan ilmu-ilmu kuantitatif, statistik dan ekonometrika. Serta mengintegrasikan antara teori dengan praktik. Standar SDM yang dipaparkan di atas dapat dicapai melalui Perguruan Tinggi, ditambah lembaga-lembaga training.

Selain itu, penelitian ini juga menyarankan agar kran kerja sama dan *network* dengan berbagai lembaga keuangan syariah, baik yang profit dan non-profit, terus diintensifkan oleh Prodi ekonomi syariah sehingga para lulusannya lebih memiliki kans dan peluang untuk ditampung dan ditempatkan pada berbagai lembaga keuangan syariah tersebut.

Bibliography

- Agustianto. 2011, "Meningkatkan Kompetensi SDM Ekonomi Syariah" dalam <http://www.agustiantocentre.com/?p=445>. Diakses 2 Juli 2014.
- Dakir. 2004. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- EuisAmalia, dkk. 2012. *Potret Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia, Analisis Kurikulum, Model Pembelajaran, dan Hubungan dengan kompetensi SDM Pada Industri Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Gramata Publisng.
- Kepmendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar.
- Laporan *Institute for Management and Islamic Economic Development* (IMIE), pada September 2012.
- Muhammad Nurdin. "SDM Berkualitas Tentukan Kemajuan Perbankan Syariah", dalam www.uinjkt.ac.id/index.php/arsip-berita-utama/1928-sdm-tentukan-kemajuan-perbankan-syariah.html, diakses 1 juli 2014
- Sukmadinata, Nana Saodih. 2005. *Pengembangan Kurikulum dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nazaruddin AW. 2013. *Alur Mata Kuliah Rumpun Ekonomi Islam*, makalah.
- Lubis, Nur A. Fadhil. 2012. *Pengembangan Studi Ekonomi Islam di PTAIN: Studi Kasus di IAIN SU Medan*. Makalah.
- Antonio, Syafii. 2007. *Tantangan Profesionalisme Industri Keuangan Syariah*, dalam Gatra edisi Khusus Lebaran 2007 No. 48 Tahun XIII, 11-24 Oktober 2007.

- S. Nasution. 1994. *Asas-asas Kurikulum*, Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 1991. *Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tim Peneliti UI. 2008. *Presentasi Seminar Penelitian UI Tahun 2003*, Jakarta: UI.
- Undang-undang No. 23 tahun 1999, pasal 1 tentang Perguruan Tinggi.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- <http://ekis.pasca.ugm.ac.id>, diakses pada tanggal 08 Juni 2013.
- [www.uni-biedefeld.de/\(de\)/soz/iw/pdf/Evers_Transition.pdf](http://www.uni-biedefeld.de/(de)/soz/iw/pdf/Evers_Transition.pdf). Pada 14 September 2012.
